



LIBERALISASI PERDAGANGAN, PENANAMAN MODAL ASING, DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA EMERGING ASIA DENGAN MODERASI PERTUMBUHAN EKONOMI

Ine Ratna Dewi¹⁾, Suparna Wijaya²⁾

1) 4122220025_ine@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

2) sprnwijaya@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN

Abstract

Tax is one of the largest sources of state revenue that supports national economic. The purpose of this study to examine the effect of trade liberalization, FDI inflows, and moderation of economic growth on tax revenue in 7 Emerging Asian countries including China, Philippines, India, Indonesia, Malaysia, Thailand, and Vietnam for the period 2002-2019. Using the Fixed Effect Model (FEM) estimation method with modification of Ridge Regression, it is concluded that trade liberalization and economic growth have a positive and significant effect on tax revenue, while FDI inflows have no effect on tax revenue. The moderation of economic growth weakens the effect of trade liberalization on tax revenue. In contrast, moderation of economic growth strengthens the effect of FDI inflows on tax revenue. The results recommend several policy implications that focuses on improving trade liberalization by encouraging a healthy business climate and competition to increase international transactions and economic growth. In addition, although FDI inflows have no effect on tax revenue, related policies need to be reviewed because the presence of FDI has potential to reduce tax revenue. The government could consider the option of gradually limiting FDI inflows to reduce fiscal incentives for foreign investors in order to reduce the decline in tax revenue due to FDI.

Keywords: *Economic growth, Emerging Asia, FDI, Tax revenue, Trade openness.*

Abstrak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang menopang perekonomian bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh liberalisasi perdagangan, FDI, dan moderasi pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak pada 7 negara Emerging Asia meliputi Cina, Filipina, India, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam periode tahun 2002-2019. Menggunakan metode estimasi *Fixed Effect Model (FEM)* dengan modifikasi *Ridge Regression*, diperoleh simpulan bahwa liberalisasi perdagangan dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, sedangkan FDI tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Keberadaan moderasi pertumbuhan ekonomi memperlemah pengaruh liberalisasi perdagangan terhadap penerimaan pajak. Sebaliknya, moderasi pertumbuhan ekonomi memperkuat pengaruh FDI terhadap penerimaan pajak. Hasil penelitian merekomendasikan beberapa implikasi kebijakan yang berfokus dalam meningkatkan liberalisasi perdagangan dengan mendorong iklim usaha dan kompetisi yang sehat untuk meningkatkan transaksi internasional dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, meskipun FDI tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak namun kebijakan yang berkaitan perlu dikaji karena keberadaan FDI berpotensi menurunkan penerimaan perpajakan. Pemerintah dapat mempertimbangkan opsi pembatasan FDI secara bertahap untuk mengurangi insentif fiskal bagi investor asing dalam mengurangi penurunan penerimaan pajak akibat FDI.

Kata kunci: Emerging Asia, FDI, Liberalisasi perdagangan, Penerimaan pajak, Pertumbuhan ekonomi.

PENDAHULUAN

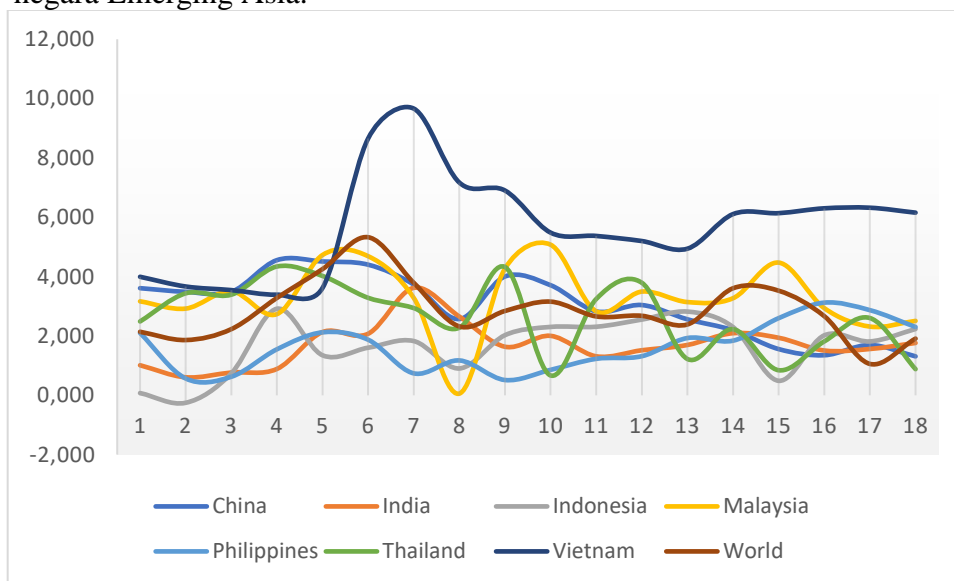
Globalisasi hadir membawa peluang sekaligus tantangan bagi perekonomian di dunia (Fitriani et al., 2021). Di tengah pesatnya kemajuan pengetahuan dan teknologi yang mendorong sistem perekonomian menjadi lebih terbuka dan bebas hambatan, seluruh negara saling berkompetisi demi meraup keuntungan dari liberalisasi perdagangan yang ada. Dengan perekonomian terbuka, hubungan transaksional antar negara menjadi lebih mudah sehingga meningkatkan volume perdagangan serta memperlancar arus barang dan jasa (Wahyudi & Ayunindien, 2022).



Melihat pentingnya liberalisasi perdagangan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi membuat beberapa organisasi ekonomi internasional seperti World Trade Organization, International Monetary Fund, dan World Bank terus mengarahkan percepatan liberalisasi perdagangan khususnya di negara berkembang (Tahir & Azid, 2015). Bagi beberapa negara hal ini merupakan peluang besar untuk menguasai perekonomian dunia. Namun bagi negara lainnya hal ini merupakan tantangan dalam mempertahankan ekonominya di tengah gempuran perekonomian internasional.

Indonesia sebagai bagian dari Emerging Asia turut andil melakukan liberalisasi perdagangan dengan harapan dapat meningkatkan efisiensi perekonomian bangsa (Budiyanti, 2017). Dalam tinjauan ekonomi regional di lingkup Asia dan Pasifik, International Monetary Fund (2023) mengelompokkan beberapa negara sebagai Emerging Asia yang beranggotakan Cina, Filipina, India, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Selama dua dekade terakhir, Emerging Asia atau disebut juga pasar berkembang di Asia telah mengungguli pasar negara berkembang lainnya dan kedepannya diperkirakan mampu memiliki pertumbuhan GDP yang lebih tinggi daripada negara maju (Beattie, 2022). Kepala Bidang Ekonomi di Euromonitor International, Ha (2021) menuturkan penyebab masifnya perkembangan pada Emerging Asia didorong oleh bonus demografi yang menguntungkan, perluasan kelas konsumen yang signifikan, urbanisasi yang terus berlanjut, serta tingkat adopsi teknologi dan transformasi digital yang tinggi.

Dengan potensi perekonomian dan tingkat liberalisasi perdagangan yang tinggi, Emerging Asia berhasil menarik ketersediaan pasokan modal dari luar negeri ke dalam negeri dalam bentuk *Foreign Direct Investment* (FDI). Peranan FDI sebagai salah satu alternatif pendanaan potensial yang digunakan untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi menyebabkan besaran FDI cenderung meningkat dari tahun ke tahun (Permana & Rivani, 2013). Berikut grafik arus masuk FDI pada 7 negara Emerging Asia.



Grafik 1 Arus Masuk FDI pada Emerging Asia Tahun 2002-2019 (dalam persen)

Sumber: Diolah dari *World Development Index*

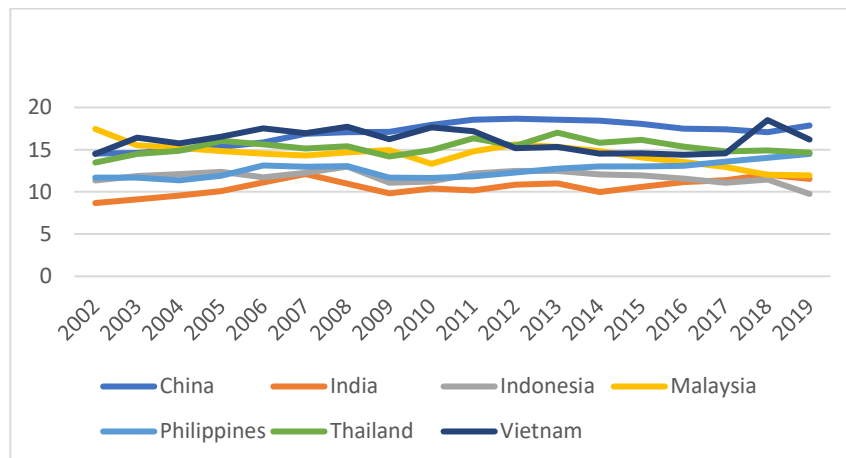
Grafik 1 menunjukkan arus masuk FDI cenderung mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2002-2019. Fluktuasi yang terjadi searah antara arus masuk FDI pada Emerging Asia dengan arus masuk FDI di tingkat dunia.



Keberadaan arus masuk FDI dan liberalisasi perdagangan tidak hanya mempengaruhi perekonomian tetapi juga turut berpengaruh terhadap penerimaan pajak secara langsung maupun tidak langsung. FDI sebagai salah satu determinan penerimaan pajak banyak dikaji oleh peneliti seperti Balıkcıoğlu et al (2016), Kim & Osei (2020), Pratomo (2019), Bayar & Ozturk (2018), Camara (2023), Janský & Palanský (2018), Maibetly & Idris (2022), Setyowati & Inriama (2020), dan Wijaya & Dewi (2022) dengan simpulan bahwa FDI mempengaruhi penerimaan pajak dengan arah hubungan positif. Namun demikian, G. A. Castro & Camarillo (2014) dan Gaspareniene et al (2022) memiliki hasil penelitian yang berbeda berupa pengaruh negatif FDI terhadap penerimaan pajak.

Serupa dengan FDI, peranan liberalisasi perdagangan sebagai salah satu faktor penentu penerimaan pajak telah dikaji dalam studi empiris terdahulu seperti penelitian Agbeyegbe et al (2004), Gaalya (2015), Epaphra & Massawe (2017), Ul-Isalm & Siddique (2017), dan Kitessa & Jewaria (2018) yang menyimpulkan pengaruh positif dan signifikan liberalisasi perdagangan terhadap penerimaan pajak. Temuan yang berbeda dihasilkan penelitian Puspasari & Gazali (2022), Egwakhe et al (2018), dan Shubati & Awad Warrad (2018) yang menunjukkan pengaruh negatif liberalisasi perdagangan terhadap penerimaan pajak. Tidak hanya itu, menurut penelitian Bayar & Ozturk (2018) liberalisasi perdagangan ternyata tidak berpengaruh terhadap penerimaan perpajakan pada negara OECD.

Sebagai aspek penting dalam perekonomian, perpajakan merupakan salah satu sumber utama pembiayaan dan pembangunan negara. Besarnya peranan pajak dalam pembangunan nasional mendorong fokus pemerintah pada upaya optimalisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Selain itu, penerimaan pajak juga berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, pemerataan distribusi, dan stabilitas sosial suatu negara. Dengan demikian, penerimaan pajak menjadi isu krusial yang menjadi perhatian pemerintah sekaligus menjadi bahan penelitian baik dalam lingkup nasional maupun global. Adapun data penerimaan perpajakan pada 7 negara Emerging Asia dimuat dalam grafik 2.



Grafik 2 Penerimaan Pajak di Negara Emerging Asia Tahun 2002-2019 (dalam persen)

Sumber: Diolah dari *World Development Index*

Berdasarkan grafik 2, tren penerimaan perpajakan pada 7 negara Emerging Asia cenderung fluktuatif sepanjang tahun 2002-2019. Besarnya potensi ekonomi pada negara Emerging Asia nyatanya belum mampu mendorong tercapainya optimalisasi penerimaan perpajakan. Selain itu, hasil penelitian terdahulu mengenai dampak arus masuk FDI dan liberalisasi perdagangan menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) yang kontradiktif satu sama lain. Oleh karena itu sangat



penting untuk mengeksplorasi dampak liberalisasi perdagangan dan arus masuk FDI terhadap kinerja penerimaan pajak mengingat pentingnya pajak secara strategis bagi pembangunan. Terlebih lagi, dari segi subjek penelitian belum ada yang membahas determinan penerimaan pajak pada 7 negara Emerging Asia periode 2002-2019.

Penelitian ini dapat menjadi studi empiris pertama yang menginvestigasi dampak liberalisasi perdagangan dan arus masuk FDI terhadap penerimaan pajak dengan menggunakan moderasi pertumbuhan ekonomi. Asumsi dasar penelitian ini bahwa dengan mengetahui pengaruh masing-masing indikator terhadap penerimaan pajak, maka otoritas yang berwenang dapat merumuskan kebijakan yang dapat meningkatkan penerimaan pajak secara optimal. Penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam memperluas temuan-temuan sebelumnya mengenai determinan penerimaan pajak.

KAJIAN PUSTAKA

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang menopang perekonomian bangsa. Menurut Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Aarsal, dalam beberapa tahun terakhir ini pajak memiliki peranan krusial dalam APBN yang tercermin dengan peningkatan penerimaan perpajakan (Direktorat Jenderal Anggaran, 2021). Dengan adanya pajak, pemerintah dapat menyediakan barang dan jasa publik, menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan pemerataan pendapatan (Putriana, 2022). Selain itu, menurut Irianto (dalam Wahyudi, 2022) pajak juga berperan sebagai instrumen pemerintah dalam melaksanakan dan memenuhi fungsi dasar dan mencapai tujuan substantif dari suatu kebijakan.

Menimbang pentingnya peranan pajak bagi pembangunan ekonomi mendorong pemerintah terus menggali potensi penerimaan pajak. Kemampuan negara dalam mengumpulkan potensi perpajakan pada perekonomian suatu negara dapat dilihat berdasarkan penerimaan perpajakan dari negara yang bersangkutan. OECD mendefinisikan penerimaan pajak sebagai pendapatan yang dikumpulkan dari pajak atas pendapatan dan keuntungan, kontribusi jaminan sosial, pajak yang dikenakan atas barang dan jasa, pajak gaji, pajak atas kepemilikan dan pengalihan properti, serta pajak lainnya (OECD, n.d.). Sedangkan menurut Hutagaol (2007) penerimaan perpajakan merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh terus-menerus dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan kondisi masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa penerimaan perpajakan diperoleh dari pemungutan pajak kepada masyarakat.

Pemungutan pajak oleh negara merupakan upaya pemerintah dalam menjamin terselenggaranya pemerintahan dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Menurut Resmi (dalam Christianingsih et al., 2016) terdapat beberapa teori yang mendasari pemungutan pajak kepada masyarakat. Salah satunya yaitu teori kewajiban mutlak atau disebut juga teori bakti. Keberadaan negara merupakan pemberi kehidupan bagi masyarakat sehingga masyarakat menunjukkan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk membayar pajak. Selain itu, negara berperan dalam melindungi seluruh warganya. Dalam teori asuransi, peranan negara ibarat perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan atas jiwa raga dan harta benda warganya. Adapun masyarakat turut berperan dengan membayarkan premi dalam bentuk pajak yang dibayarkan (Sutedi, 2013).

Untuk mengetahui indikasi besaran beban pajak (*tax burden*) yang ditanggung oleh masyarakat sekaligus indikator dalam evaluasi penerimaan perpajakan di suatu negara umumnya menggunakan perbandingan penerimaan pajak terhadap *Gross Domestic Product* (GDP). Semakin tinggi perbandingan penerimaan pajak terhadap GDP, maka semakin baik kinerja dan kemampuan negara dalam penerimaan pajak.



Liberalisasi Perdagangan

Liberalisasi perdagangan menggambarkan transaksi ekonomi di lingkup internasional. OECD (2011) mendefinisikan liberalisasi perdagangan sebagai rasio perdagangan terhadap GDP yang digunakan untuk mengukur pentingnya transaksi internasional relatif terhadap transaksi domestik. Secara sederhana liberalisasi perdagangan dihitung dengan menjumlahkan ekspor dan impor barang jasa relatif terhadap GDP. Sebagaimana namanya, liberalisasi perdagangan mengukur tingkat liberalisasi suatu negara terhadap perdagangan internasional.

Teori pertumbuhan ekonomi modern memandang liberalisasi perdagangan sebagai salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Menurut Zeren & Ari (2013), negara yang melakukan perdagangan internasional dalam bentuk impor dan ekspor secara intensif memiliki keunggulan komparatif yang meningkatkan produksi berkelanjutan. Oleh karena itu berbagai negara membuat kebijakan yang dapat mendorong peningkatan transaksi internasional (Diouf & Hai, 2017).

Dalam kaitannya dengan penerimaan pajak, liberalisasi perdagangan dianggap sebagai penentu mendasar dari kinerja penerimaan pajak oleh berbagai penelitian. Soro (2020) mengungkapkan perdagangan dengan pihak luar merupakan basis yang lebih kena pajak dibandingkan dengan pendapatan dan transaksi dalam negeri. Selain itu, peningkatan liberalisasi perdagangan suatu negara berpengaruh pada penetapan tarif pajak yang berlaku. Dengan meningkatnya volume transaksi internasional, otoritas perpajakan akan menaikkan tarif pajak impor dan ekspor yang pada akhirnya akan mempengaruhi penerimaan pajak negara tersebut (Puspasari & Gazali, 2022).

Foreign Direct Investment

Foreign Direct Investment (FDI) adalah penanaman modal pada suatu perusahaan di negara lain dalam jangka waktu yang lumayan panjang (Anwar et al., 2016). Organization for Economics Cooperation and Development (OECD) mendefinisikan FDI sebagai cerminan tujuan suatu entitas setempat pada satu perekonomian untuk menciptakan kepentingan jangka panjang pada sebuah perusahaan yang berlokasi di perekonomian lain (OECD, 2008). Oleh karena itu, dalam FDI terjalin hubungan jangka panjang antara negara tujuan investasi (*host country*) dan negara asal investasi (*home country*) dengan syarat kepemilikan saham minimal 10% dari saham di perusahaan tujuan. Arus investasi yang diterima oleh *host country* dari *home country* disebut FDI, sedangkan arus investasi yang dikeluarkan oleh *home country* menuju ke *host country* disebut arus keluar FDI.

Keberadaan FDI di suatu negara memberikan dampak positif terhadap perekonomian melalui *spillover effect* berupa transfer ilmu pengetahuan dan teknologi dari *home country* ke *host country*, peningkatan ekspor, serta penyediaan lapangan pekerjaan (Sujarwati & Qibthiyah, 2020). Hal ini memacu kompetisi antara negara dalam menarik FDI ke dalam negeri. Data *World Investment Report 2020* menyebutkan bahwa kebijakan perpajakan merupakan salah satu instrumen yang diterapkan untuk menarik FDI ke suatu negara (UNCTAD, 2020). Selain itu, OECD dan IMF (2017) juga menyatakan pajak sebagai faktor penting dalam pertimbangan investasi. Oleh karena itu, negara saling berlomba menurunkan tarif pajak dan memberikan insentif perpajakan lainnya.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran pendapatan nasional yang diperoleh melalui produksi agregat dan diproses dengan *Gross Domestic Product* (GDP). Simon Kuznet memaknai pertumbuhan ekonomi sebagai proses peningkatan kapasitas produksi suatu negara dalam menyediakan berbagai jenis barang ekonomi dalam jangka panjang (Todaro, 2000). Sedangkan Sukirno (2013) memandang pertumbuhan ekonomi dalam bentuk perkembangan kegiatan perekonomian yang meningkatkan produksi barang dan jasa sekaligus meningkatkan



kemakmuran masyarakat. Peningkatan pertumbuhan ekonomi terjadi dalam hal GDP pada suatu periode lebih besar daripada periode sebelumnya, dan begitupun sebaliknya.

Sebagai salah satu tolok ukur perekonomian negara, GDP memberikan gambaran atas perekonomian yang telah dicapai suatu negara sekaligus memberikan prediksi akan perekonomian negara tersebut di masa depan. Oleh karena itu, setiap negara menghendaki pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat setiap tahunnya. Dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi umumnya digunakan instrumen kebijakan fiskal. Sesuai dengan teori hubungan pertumbuhan ekonomi dan perpajakan yang dikemukakan oleh Peacock dan Wiseman (dalam Pratama & Widyastuti, 2022), pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan penerimaan pajak meskipun tarif pajak tidak berubah. Setyowati & Inriama (2020) mengungkapkan pengaruh positif dan signifikan pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan perpajakan. Hal ini berarti peningkatan pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan peningkatan penerimaan pajak dan begitupun sebaliknya.

Penelitian Terdahulu

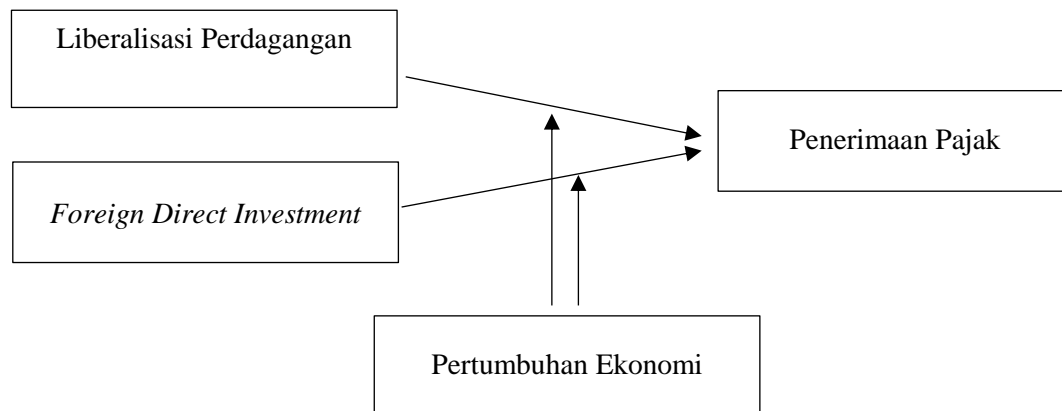
Studi empiris mengenai determinan penerimaan pajak telah dilakukan dalam berbagai periode dan region. Beberapa penelitian awal yang dilakukan oleh Heller (1975) dan Bahl (1971) berfokus pada tingkat pembangunan, monetisasi ekonomi, liberalisasi perdagangan dan komposisi sektoral terhadap PDB dalam peranannya sebagai penentu penerimaan pajak (Soro, 2020). Beberapa penelitian selanjutnya menambahkan faktor-faktor penentu penerimaan pajak seperti tingkat kepatuhan pajak, Beberapa penulis telah melengkapi faktor-faktor yang diidentifikasi oleh para pendahulu ini dengan faktor-faktor penentu sosial seperti tata kelola pemerintahan (Simbachawene, 2018), kependudukan (Naape, 2021), infrastruktur komunikasi dan informasi (Mallick, 2021), politik (Yogo & Ngo Njib, 2018), korupsi (Arif & Rawat, 2018; Epaphra & Massawe, 2017), dan investasi asing dalam bentuk FDI (Balıkcıođlu et al., 2016; Bayar & Ozturk, 2018; Gasparenienne et al., 2022; Gnanon, 2017; Janský & Palanský, 2018; Pratomo, 2019).

Sebagian besar penelitian ini menggunakan penerimaan pajak dalam bentuk proporsi dari GDP sebagai variabel dependen dengan kombinasi variabel independen yang berbeda. Menurut Baer & Galfao (dalam Saptono & Mahmud, 2021) penggunaan variabel penerimaan pajak sebagai proporsi dari GDP memberikan dasar dalam membandingkan kinerja pajak pada berbagai negara.

Penelitian Epaphra & Massawe (2017) menguji pengaruh faktor struktural, institusional dan kebijakan terhadap penerimaan pajak pada 30 negara di Afrika selama periode 1996-2016. Simpulan atas penelitian tersebut menunjukkan liberalisasi perdagangan sebagai salah satu faktor penentu yang sangat penting bagi penerimaan pajak di Afrika. Faktanya, penerimaan pajak di negara-negara Afrika merespons lebih signifikan terhadap peningkatan perdagangan daripada faktor-faktor lain yang diujikan.

Selanjutnya untuk menguji determinan pajak pada 8 negara di Asia Tenggara periode 2000-2016, Minh Ha et al (2022) menggunakan metode regresi data panel statis dan dinamis dengan simpulan bahwa liberalisasi perdagangan, FDI, rasio utang luar negeri terhadap PDB, dan kontribusi sektor industri terhadap PDB memiliki dampak positif terhadap penerimaan pajak. Sejalan dengan penelitian Saptono & Mahmud (2021), liberalisasi perdagangan terbukti sebagai salah satu determinan penerimaan pajak pada 6 negara di Asia Tenggara periode 2008-2019.

Studi terkini mengenai penerimaan pajak dilakukan oleh Camara (2023) yang bertujuan untuk menguji pengaruh FDI terhadap penerimaan pajak pada 90 negara berkembang tahun 1996-2017. Dengan menggunakan metode estimasi GMM diperoleh hasil penelitian bahwa FDI mengarah pada peningkatan penerimaan pajak yang signifikan.



Gambar 1 Kerangka Berpikir

Atas dasar kerangka berpikir pada gambar 1, maka dibentuklah hipotesis berikut ini.

- H1 : Liberalisasi perdagangan berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak
- H2 : *Foreign Direct Investment* berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak
- H3 : Pertumbuhan ekonomi memperkuat pengaruh positif liberalisasi perdagangan terhadap penerimaan pajak
- H4 : Pertumbuhan ekonomi memperkuat pengaruh positif *Foreign Direct Investment* terhadap penerimaan pajak
- H5 : Liberalisasi perdagangan, *Foreign Direct Investment*, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap penerimaan pajak

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan objek penelitian berupa penerimaan pajak pada 7 negara yang termasuk dalam Emerging Asia yaitu China, Filipina, India, Indonesia, Malaysia, Thailand dan Vietnam. Adapun observasi penelitian dilakukan selama periode 2002 sampai dengan 2019.

Pemilihan variabel yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Epaphra & Massawe (2017), Arif & Rawat (2018), Saptono & Mahmud (2021), Minh Ha et al (2022), dan Camara (2023). Variabel tersebut dipilih berdasarkan kemampuannya untuk mempengaruhi tingkat kinerja penerimaan pajak. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari dua sumber data yaitu penerimaan perpajakan, liberalisasi perdagangan, arus masuk FDI, kontribusi sektor jasa terhadap PDB dan pertumbuhan ekonomi dari laman The World Bank serta indeks penegakan hukum dan indeks kualitas regulasi dalam *Worldwide Governance Indicator* dari laman The World Bank. Pengolahan data penelitian menggunakan program STATA 17 dan pengolahan data deskriptif sederhana menggunakan aplikasi Microsoft Excel.

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan model persamaan regresi data panel untuk menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen pada 7 negara Emerging Asia. Agar model penelitian memiliki varians yang tidak bias dan koefisien yang dihasilkan linear, asumsi BLUE (*Best Linear Unbiased Estimate*) harus terpenuhi. Model dasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$TR = f(OPEN, FDI, GDP, OPEN * GDP, FDI * GDP, LAW, REG, SERV)$$

Adapun model persamaan regresinya sebagai berikut:



$$TR_{it} = \beta_0 + \beta_1 OPEN_{it} + \beta_2 FDI_{it} + \beta_3 \ln GDP_{it} + \beta_4 OPEN * \ln GDP_{it} + \beta_5 FDI * \ln GDP_{it} + \beta_6 LAW_{it} + \beta_7 REG_{it} + \beta_8 SERV_{it} + \varepsilon$$

Secara umum, penelitian harus memiliki variabel penelitian yang menjadi objek dari sebuah pengamatan atau penelitian yang kemudian akan diukur oleh peneliti. Tabel 1 menyajikan data mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian.

Tabel 1 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Notasi	Definisi	Satuan	Sumber Data
Variabel Dependen				
Penerimaan Pajak	TR	Jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan GDP	Persentase	The World Bank
Variabel Independen				
Liberalisasi Perdagangan	OPEN	Jumlah ekspor dan impor dibandingkan dengan total GDP	Persentase	The World Bank
<i>Foreign Direct Investment</i>	FDI	penanaman modal asing di dalam negeri dibandingkan dengan total GDP	Persentase	The World Bank
Variabel Moderasi				
Pertumbuhan Ekonomi	GDP	Nilai agregat GDP yang menggambarkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri	US\$ Miliar	The World Bank
Variabel Kontrol				
Indeks Penegakan Hukum	LAW	Indikator yang menunjukkan sejauh mana pemerintah memiliki kepercayaan dan mematuhi aturan masyarakat, khususnya kualitas penegakan hukum	Indeks	The WGI
Indeks Kualitas Regulasi	REG	Indikator yang menunjukkan kemampuan pemerintah dalam perumusan dan implementasi kebijakan dan peraturan yang mendorong pengembangan sektor swasta	Indeks	The WGI
Kontribusi Sektor Jasa	SERV	Kontribusi sektor jasa terhadap total GDP	Persentase	The World Bank

Sumber: Diolah penulis, 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif Data

Statistik deskriptif menyajikan gambaran awal mengenai pola penyebaran variabel penelitian yang berguna untuk memahami kondisi dan populasi penelitian. Adapun hasil statistik deskriptif pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2 yang menyajikan data mengenai jumlah observasi, rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, serta nilai maksimum.



Tabel 2 Statistik Deskriptif Penelitian

Variable	Obs	Mean	Std. dev	Min	Max
TR	126	13,968	2,449	8,676	18,665
OPEN	126	91,534	48,528	29,508	210,374
FDI	126	2,813	1,742	-0,254	9,663
LnGDP	126	26,930	1,371	24,280	30,289
OPEN*LnGDP	126	2422,159	1219,784	795,769	5374,973
FDI*LnGDP	126	75,174	44,838	-6,657	244,665
LAW	126	-0,199	-0,199	-0,914	0,623
REG	126	-0,110	-0,110	-0,795	0,838
SERV	126	47,244	47,244	36,732	60,852

Sumber: Data olahan STATA, 2023.

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Terdapat tiga jenis model estimasi dalam regresi data panel yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Dalam menentukan model terbaik pada penelitian dilakukan tiga uji model yaitu Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji *Lagrange Multiplier* (LM). Pada tahap pertama terlebih dahulu dilakukan Uji Chow untuk memilih model panel antara CEM dan FEM, dilanjutkan dengan Uji Hausman untuk menguji antara REM dan FEM, dan yang terakhir Uji LM untuk memilih antara REM dan CEM. Apabila suatu model terpilih dua kali, maka model tersebut terpilih sebagai model penelitian.

Tabel 3 Pemilihan Model Data Panel

Uji Model	Hasil	Keterangan
Uji Chow	Prob>F0.0000	H ₀ ditolak dan H ₁ diterima, sehingga <i>Fixed Effect Model</i> yang terpilih
Uji Hausman	Prob>chi2 = 0.0000	H ₀ ditolak dan H ₁ diterima, sehingga <i>Fixed Effect Model</i> yang terpilih
Uji <i>Lagrange Multiplier</i>	Prob>chibar2 = 1.0000	maka H ₀ diterima dan H ₁ ditolak, sehingga <i>Common Effect Model</i> yang terpilih

Sumber: Data olahan STATA, 2023.

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 3, diperoleh model yang paling sesuai untuk menggambarkan kondisi penelitian yaitu *Fixed Effect Model*.

Uji Asumsi Klasik

Dalam melakukan penelitian, penulis terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik untuk mendapatkan keyakinan bahwa sampel penelitian telah terbebas dari pelanggaran. Agar memperoleh persamaan regresi yang bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*), penelitian harus melalui dan terbebas dari 4 uji yaitu normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi. Apabila terdapat salah satu uji asumsi yang tidak sesuai standar, maka pengambilan keputusan hipotesis dengan Uji F dan Uji T menjadi bias.

Tabel 4 Uji Asumsi Klasik

Uji Model	Nilai Probabilitas
Normalitas	Prob>chi2 = 0,8765
Multikolinearitas	VIF OPEN : 1677,26
	VIF OPEN*lnGDP : 1561,73
	VIF FDI : 1004,42



	VIF FDI*lnGDP	: 964,96
	VIF lnGDP	: 9,57
	VIF REG	: 4,93
	VIF LAW	: 3,08
	VIF SERV	1,93
	Mean VIF	653,48
Heteroskedastisitas	Prob>chi2 = 0,7008	
Autokorelasi	Prob > F = 0,1342	

Sumber: Data olahan STATA, 2023

Berdasarkan tabel 4, interpretasi hasil pengujian data terkait dengan uji normalitas diperoleh nilai Prob>chi2 sebesar 0,8765 yang lebih besar dari level signifikansi penelitian (α) sebesar 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian berasal dari populasi yang berdistribusi normal dan dapat digunakan untuk melakukan pengujian selanjutnya.

Dalam uji *Variance Inflation Factor* (VIF) pada tabel 4 diperoleh nilai VIF beberapa variabel dan rata-rata VIF lebih besar dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi yang tinggi antar variabel dalam model penelitian yang dapat menyebabkan standar error semakin besar. Menurut Markidakis (dalam Nurdin & Sugiman, 2018), terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi gejala multikolinearitas pada variabel yang diujikan, diantaranya dengan menggunakan metode *ridge regression*. Setelah dilakukan metode *ridge regression*, seluruh variabel yang diujikan dalam penelitian ini telah bebas dari masalah multikolinearitas.

Pengujian heteroskedastisitas pada penelitian ini dilakukan dengan uji *Breusch Pagan Godfrey*. Suatu model regresi yang baik merupakan model yang homoskedastisitas atau bisa juga dikatakan tidak mengalami heteroskedastisitas. Interpretasi hasil pengujian data terkait dengan uji *Breusch Pagan Godfrey* pada tabel 4 diperoleh prob>chi2 dengan nilai 0,7008 yang lebih besar dari level signifikansi penelitian (α) sebesar 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model penelitian.

Selain itu, untuk menguji ada tidaknya autokorelasi dalam model penelitian perlu dilakukan *Wooldridge Test Autocorrelation*. Interpretasi hasil pengujian data terkait dengan *Wooldridge Test Autocorrelation* diperoleh *p-value* sebesar 0,1342 yang lebih besar dari level signifikansi penelitian (α) sebesar 5%. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa data yang diuji tidak ada masalah autokorelasi.

Setelah dilakukan pengujian dan pengobatan atas masalah multikolinearitas antar variabel, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa model penelitian ini telah memenuhi seluruh uji asumsi klasik yang dilakukan.

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi memberikan gambaran mengenai besaran pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen yang memiliki nilai antara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka seluruh variabel independen dapat secara luas dan mendalam menjelaskan variabel dependen. Sedangkan apabila nilai koefisien determinasi semakin rendah, maka seluruh variabel independen secara terbatas menjelaskan variabel dependen.

Berdasarkan hasil pengujian *Fixed Effect Model*, *Adjusted R²* penelitian ini sebesar 0,649 atau sekitar 64,9%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen, variabel moderasi dan variabel kontrol yang diujikan secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen sebesar 64,9%. Adapun 35,1% lainnya merupakan variabel lain yang berada diluar model dan tidak dapat terdeteksi dalam penelitian ini.



Persamaan regresi data panel dengan *Fixed Effect Model* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$TR_{it} = -55,52 + 0,39OPEN_{it} - 1,48FDI_{it} + 2,1lnGDP_{it} - 0,01OPEN * lnGDP_{it} + 0,07FDI * lnGDP_{it} - 4,73LAW_{it} + 0,44REG_{it} + 0,12SERV_{it} + \varepsilon$$

Sesuai dengan model penelitian, dapat diartikan bahwa rasio penerimaan pajak sebesar -55,52 dalam kondisi tanpa adanya variabel liberalisasi perdagangan, FDI, dan pertumbuhan ekonomi.

Uji Hipotesis Simultan (Uji F)

Pengujian signifikansi simultan atau biasa disebut uji F dilakukan untuk menguji besaran pengaruh simultan dari seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila nilai probabilitas F hitung lebih kecil dari level signifikansi penelitian (α) sebesar 5%, maka seluruh variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen. Berdasarkan hasil pengujian *Fixed Effect Model*, diperoleh nilai Prob>F sebesar 0,0000 yang jauh lebih kecil dibandingkan α . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen yang diujikan secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Pengujian signifikansi parsial dari variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen dilakukan dengan uji t. Menurut Ghozali (2009), pada dasarnya uji t menunjukkan ada atau tidaknya pengaruh variabel independen secara parsial/individual terhadap variabel dependen. Uji hipotesis ini disebut sebagai uji t karena pengujiannya mengikuti nilai t pada tabel. Cara pengambilan keputusan uji t yaitu dengan menggunakan uji probabilitas. Hasil uji hipotesis dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 5 Uji Hipotesis Parsial Atas Variabel

Variable	Coefficient	Std. err	t	P> t
OPEN	0,3997713	0,0865423	4,62	0,000
FDI	-1,474269	1,865766	-0,79	0,431
LnGDP	2,108497	0,2313388	9,11	0,000
OPEN*LnGDP	-0,0129103	0,0033223	-3,89	0,000
FDI*LnGDP	0,0674981	0,0710438	0,95	0,344
LAW	-4,733978	0,4755063	-9,96	0,000
REG	0,4388755	0,5895357	0,74	0,458
SERV	0,1174875	0,0236929	4,96	0,000

Sumber: Data olahan STATA, 2023.

Berdasarkan hasil uji hipotesis diketahui bahwa variabel independen berupa liberalisasi perdagangan dan variabel moderasi berupa pertumbuhan ekonomi memiliki nilai *p-value* lebih kecil dari level signifikansi penelitian (α) sebesar 5% yang artinya liberalisasi perdagangan dan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi penerimaan perpajakan secara parsial dengan signifikan. Begitu pula dengan interaksi antara liberalisasi perdagangan dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil yang signifikan dengan nilai *p-value* kurang dari 5%. Namun meskipun berpengaruh signifikan, kehadiran pertumbuhan ekonomi sebagai moderasi memperlemah pengaruh liberalisasi perdagangan terhadap penerimaan pajak yang ditunjukkan dengan penurunan nilai koefisien dari 0,348 menjadi -0,01.

Adapun variabel FDI memiliki nilai *p-value* lebih besar dari level signifikansi penelitian (α) sebesar 5% sehingga pengaruhnya terhadap penerimaan perpajakan secara parsial tidak signifikan. Serupa dengan pengaruh FDI yang tidak signifikan, hasil interaksi antara FDI dengan pertumbuhan



ekonomi menunjukkan bahwa FDI secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan perpajakan.

Pengaruh Liberalisasi Perdagangan Terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian, liberalisasi perdagangan (OPEN) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak pada 7 negara Emerging Asia periode 2002-2019 dengan arah hubungan yang positif. Dengan asumsi variabel lainnya tetap (*ceteris paribus*), peningkatan liberalisasi perdagangan sebesar 1% akan menyebabkan penerimaan pajak di negara Emerging Asia meningkat sebesar 0,35%.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori ekonomi yang menyatakan bahwa kemudahan transaksi internasional akan membawa peningkatan pada volume perdagangan dan kinerja penerimaan pajak. Penelitian Gaalya (2015) dan Saptono & Mahmud (2021) menyimpulkan bahwa liberalisasi perdagangan mendorong peningkatan akses konsumen atas barang dan jasa dalam bentuk impor dan ekspor yang pada akhirnya mengarah pada penerimaan pajak tidak langsung dalam bentuk PPN dan PPnBM.

Epaphra & Massawe (2017), Ul-Isalm & Siddique (2017), dan Kitessa & Jewaria (2018) menguatkan hasil penelitian dengan penjelasan bahwa liberalisasi perdagangan cenderung memperluas basis pajak yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan pajak domestik. Terpusatnya barang masuk dan barang keluar dari suatu negara mempermudah pengenaan pajak yang berhubungan dengan perdagangan internasional.

Namun demikian, hasil penelitian ini berbeda dengan Soro (2020) yang mendapati dampak negatif liberalisasi perdagangan pada penerimaan pajak. Dalam penelitiannya di Côte d'Ivoire, berkembangnya area perdagangan bebas justru menyebabkan penurunan tarif pajak dan cukai yang berlaku sehingga menurunkan penerimaan pajak. Begitu pula penelitian Puspasari & Gazali (2022), Egwakhe et al (2018), dan Shubati & Awad Warrad (2018) menunjukkan keberadaan liberalisasi perdagangan yang berpotensi menurunkan penerimaan perpajakan.

Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa liberalisasi perdagangan berperan sebagai salah satu determinan penerimaan pajak pada 7 negara Emerging Asia.

Pengaruh Foreign Direct Investment Terhadap Penerimaan Pajak

Dalam pengujian yang dilakukan, FDI menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan pada penerimaan pajak karena memiliki nilai *p-value* lebih besar dari level signifikansi penelitian (α) sebesar 5%. Koefisien dari regresi FDI sebesar -1,21 menandakan adanya hubungan negatif antara FDI terhadap penerimaan pajak sehingga jika FDI semakin meningkat maka penerimaan pajak semakin menurun, begitupun sebaliknya. Dengan asumsi *ceteris paribus*, kenaikan 1% pada FDI akan menurunkan penerimaan pajak sebesar 1,21%.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis sebelumnya yang menjelaskan pengaruh positif FDI terhadap penerimaan pajak. Perbedaan hasil penelitian ini dimungkinkan karena dampak FDI terhadap penerimaan pajak bergantung pada tingkat persaingan di pasar dan limpahan teknologi pada negara yang diteliti (Basheer et al., 2019).

Tidak signifikannya pengaruh arus masuk FDI terhadap penerimaan pajak sejalan dengan penelitian Balıkcıoğlu et al (2016) yang mengungkapkan bahwa arus masuk penanaman modal asing ke dalam negeri tidak termasuk dalam faktor penentu penerimaan pajak yang signifikan. Secara statistik, hal ini disebabkan karena tarif pajak merupakan faktor pendukung bagi investor dalam menanamkan modalnya (Setyowati & Inriama, 2020). Terdapat beberapa faktor lainnya yang menjadi pertimbangan utama investor dalam melakukan investasi.

Pratomo (2019) membagi pengaruh negatif FDI terhadap penerimaan pajak menjadi pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Persaingan tarif pajak antar negara dalam



menarik arus masuk FDI merupakan salah satu penyebab langsung menurunnya penerimaan pajak. Selain itu, adanya fasilitas perpajakan berupa insentif fiskal yang diberikan kepada investor asing pun turut menurunkan potensi penerimaan pajak (Puspasari & Gazali, 2022). Fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi akan terjadi peningkatan arus masuk FDI, namun di sisi lain berdampak pada penurunan penerimaan pajak. Menurut Gaspareniene et al (2022), Cobham & Janský (2018), Crivelli et al (2015) dan Janský & Palanský (2018), insentif fiskal dapat mengurangi basis pajak, mendistorsi alokasi sumber daya untuk kepentingan investor asing dengan mengorbankan perusahaan-perusahaan domestik, serta menghilangkan penerimaan pajak karena pengalihan laba. Tidak hanya berkaitan dengan aturan dan kebijakan fiskal, pengaruh langsung FDI terhadap penurunan penerimaan pajak dapat terjadi dalam hal investor asing melakukan praktik *transfer pricing* (Pratomo, 2019).

Penelitian Bayar & Ozturk (2018) mengungkapkan adanya dampak persaingan antara investor asing dan perusahaan domestik pada penurunan kontribusi perusahaan domestik terhadap perekonomian. Hal ini dikarenakan perusahaan domestik yang mayoritas berupa perusahaan kecil dan menengah belum mampu bersaing dengan perusahaan asing yang didanai dengan FDI (UNCTAD, 2012). Kondisi ini diperparah dengan terjadinya *crowding-out* ketika pekerja berbakat dari perusahaan domestik ditarik oleh perusahaan asing sehingga menimbulkan persaingan yang tidak merata dan berdampak terhadap penurunan penerimaan pajak (Nguyen et al., 2014).

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak

Pengujian pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak memberikan hasil *p-value* lebih kecil dari level signifikansi penelitian (α) sebesar 5% dan koefisien sebesar 1,557707. Dapat diartikan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi mempengaruhi penerimaan pajak secara positif dan signifikan. Dengan asumsi *ceteris paribus*, kenaikan 1% pada GDP akan meningkatkan penerimaan pajak sebesar 1,56%.

Studi mengenai peranan pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu determinan penerimaan pajak telah dilakukan secara luas. Amaludin & Romadhina (2023) menjelaskan pengaruh signifikan pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak disebabkan upaya pemerintah yang terus menggali dan mendukung potensi sumber daya dengan melakukan pembangunan yang merata dengan tujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang dapat menambah pendapatan negara. Signifikansi pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak sejalan dengan hasil penelitian Setyowati & Inriama (2020), Puspasari & Gazali, 2022) Hamdan & Rana (2021), dan Albimana & Moh'd Hemedb (2022)

yang mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan GDP merupakan salah satu faktor penentu penerimaan pajak yang signifikan. Secara statistik, penerimaan pajak cenderung responsif terhadap pertumbuhan ekonomi (Muibi & Sinbo, 2013).

Yunus (2022) menuturkan peningkatan GDP diartikan dengan bertambahnya barang dan jasa yang diproduksi sehingga meningkatkan pendapatan sekaligus konsumsi masyarakat. Hal ini menyebabkan besaran pertumbuhan ekonomi berbanding lurus dengan besaran basis pajak. Dengan demikian, peningkatan basis pajak akan diikuti oleh peningkatan penerimaan pajak (Maryantika & Wijaya, 2022).

Pengaruh Liberalisasi Perdagangan dengan Moderasi Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis, diperoleh koefisien regresi sebesar -0,0122289 dan nilai *p-value* lebih kecil dari 5%. Hal ini menunjukkan interaksi antara liberalisasi perdagangan dengan pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh yang signifikan dengan arah hubungan negatif. Terdapat pengaruh tidak langsung liberalisasi perdagangan terhadap penerimaan



pajak melalui pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, kehadiran pertumbuhan ekonomi sebagai moderasi nyatanya memperlemah pengaruh liberalisasi perdagangan terhadap penerimaan pajak. Dapat diartikan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di suatu negara maka akan semakin memperlemah kontribusi liberalisasi perdagangan terhadap penerimaan pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Osei et al (2019) yang menuturkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan liberalisasi perdagangan di beberapa negara berpenghasilan rendah merupakan hubungan yang tidak linier dan berbentuk U terbalik. Oleh karena itu, meskipun peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan liberalisasi perdagangan namun pada ambang batas tertentu setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi justru mengurangi liberalisasi perdagangan.

Hasil penelitian ini mengindikasikan pentingnya peranan pemerintah dalam memperhatikan kebijakan terkait pertumbuhan ekonomi karena pengaruhnya yang dapat meningkatkan atau justru menghambat liberalisasi perdagangan.

Pengaruh *Foreign Direct Investment* dengan Moderasi Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak

Hasil pengujian menunjukkan interaksi antara arus masuk FDI dengan pertumbuhan ekonomi memiliki nilai *p-value* lebih dari 5% dan nilai koefisien regresi sebesar 0,0486281. Dengan adanya moderasi pertumbuhan ekonomi, pengaruh arus masuk FDI terhadap penerimaan pajak yang mulanya negatif mengalami penguatan sehingga menghasilkan hubungan searah. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di suatu negara maka semakin besar kontribusi arus masuk FDI terhadap penerimaan pajak.

Peranan pertumbuhan ekonomi dalam memperkuat pengaruh arus masuk FDI terhadap penerimaan pajak sesuai dengan penelitian Septiantoro et al. (2020) dan Wahyu et al (2022) yang menyebutkan adanya hubungan searah dan signifikan antara pertumbuhan ekonomi dan FDI. Sehingga peningkatan pada GDP akan diikuti oleh peningkatan arus masuk FDI.

Namun demikian, hal tersebut belum mampu merubah signifikansi pengaruh arus masuk FDI terhadap penerimaan pajak. Penjelasan logis atas kondisi ini sesuai dengan penelitian Balıkcıoğlu et al (2016) yang menyimpulkan bahwa arus masuk FDI bukanlah faktor utama yang mempengaruhi penerimaan pajak. Sehingga interaksi dengan pertumbuhan ekonomi pun belum mampu membuat pengaruh arus masuk FDI menjadi signifikan. Selain itu, pengaruh GDP terhadap arus masuk FDI ditentukan oleh tingkat pertumbuhan pasar modal. Sehingga tanpa adanya dukungan pasar modal yang stabil maka pengaruh GDP terhadap arus masuk FDI cenderung kecil (Kim & Osei, 2020).

PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh liberalisasi perdagangan, arus masuk FDI, dan moderasi pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak pada 7 negara Emerging Asia periode tahun 2002-2019. Dengan menggunakan model regresi data panel, metode estimasi *Fixed Effect Model* (FEM), dan modifikasi metode *Ridge Regression* dalam mengatasi masalah multikolinearitas, diperoleh simpulan bahwa liberalisasi perdagangan dan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi penerimaan pajak secara signifikan dengan arah hubungan positif. Adapun interaksi antara pertumbuhan ekonomi dan liberalisasi perdagangan tidak memberikan hasil yang sesuai harapan. Hasil penelitian menunjukkan peranan pertumbuhan ekonomi memperlemah pengaruh liberalisasi perdagangan terhadap penerimaan perpajakan.

Namun demikian, berbeda dari liberalisasi perdagangan dan pertumbuhan ekonomi, pengaruh arus masuk FDI tidak signifikan terhadap penerimaan pajak pada lingkup Emerging Asia.



Begitu pun dengan kehadiran pertumbuhan ekonomi sebagai moderasi belum mampu mengubah pengaruh arus masuk FDI terhadap penerimaan pajak.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi kebijakan terkait peningkatan penerimaan pajak dengan fokus pada liberalisasi perdagangan, arus masuk FDI, dan pertumbuhan ekonomi. Pertama, kebijakan yang berkaitan dengan liberalisasi perdagangan dan pertumbuhan ekonomi perlu diperhatikan agar mampu mendorong iklim usaha dan kompetisi yang sehat sehingga mampu meningkatkan transaksi internasional sekaligus pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Kedua, kebijakan yang berkaitan dengan arus masuk FDI perlu dikaji kembali. Meskipun pengaruh arus masuk FDI tidak signifikan dalam menentukan penerimaan pajak, namun peningkatan arus masuk FDI berpotensi menurunkan penerimaan pajak. Oleh karena itu, perlu dirumuskan kebijakan yang dapat menghindari penurunan penerimaan pajak akibat adanya FDI sekaligus mempertimbangkan opsi pembatasan arus masuk FDI secara bertahap dengan mengurangi insentif fiskal kepada investor asing.

Dalam melakukan observasi mengenai determinan penerimaan pajak, terdapat keterbatasan yang ditemui diantaranya faktor penentu penerimaan pajak tidak dimasukkan seluruhnya. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas dan mengembangkan model penelitian yang lebih sempurna dengan menambahkan beberapa faktor lainnya seperti kontribusi *underground economy*, digitalisasi ekonomi, serta isu terkini yang tengah hangat diperbincangkan dunia. Penelitian selanjutnya juga dapat dikembangkan dengan menambah periode waktu observasi dan memperluas cakupan sampel penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agbeyegbe, T., Stotsky, J. G., & Woldemariam, A. (2004). *Trade Liberalization, Exchange Rate Changes, and Tax Revenue in Sub-Saharan Africa*.
- Albimana, M. M., & Moh'd Hemedb, I. (2022). *The Determinants of Tax Revenues among EAC members*. <https://atcr.kra.go.ke>
- Amaludin, TB. A., & Romadhina, A. P. (2023). Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi di Indonesia Periode 2017-2021. *Jurnal Akuntansi & Perpajakan*, 4(2), 4–2.
- Anwar, C. J., Kuswantoro, & Dewi, S. F. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Foreign Direct Investment (FDI) di Kawasan Asia Tenggara. *Media Trend*, 11(2), 175. <https://doi.org/10.21107/mediatrend.v11i2.1621>
- Arif, I., & Rawat, A. S. (2018). Corruption, Governance, and Tax Revenue: Evidence from EAGLE Countries. *Journal of Transnational Management*, 23(2–3), 119–133. <https://doi.org/10.1080/15475778.2018.1469912>
- Bahl, R. B. (1971). A Regression Approach to Tax Effort. *ECON Publications*, 570–613.
- Balıkçioğlu, E., Dalgıç, B., & Fazlıoğlu, B. (2016). Does Foreign Capital Increase Tax Revenue: The Turkish Case. *International Journal of Economics and Financial Issues* |, 6(2), 776–781. <http://www.econjournals.com>
- Basheer, M. F., Ahmad, A. A., & Hassan, S. G. (2019). Impact of economic and financial factors on tax revenue: Evidence from the Middle East countries. *Accounting*, 5, 53–60. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2018.08.001>
- Bayar, Y., & Ozturk, O. F. (2018). Impact of foreign direct investment inflows on tax revenues in OECD countries: A panel cointegration and causality analysis (1). In *Theoretical and Applied Economics: Vol. XXV* (Issue 1).



- Beattie, R. (2022). *The rise of emerging markets in Asia*. Reuters. <https://www.reuters.com/article/sponsored/the-rise-of-emerging-markets-in-asia>
- Budiyanti, E. (2017). Dampak Liberalisasi Perdagangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Kajian*, 22(1), 45–48. <http://www.>
- Camara, A. (2023). The Effect of Foreign Direct Investment on Tax Revenue. *Comparative Economic Studies*, 65(1), 168–190. <https://doi.org/10.1057/s41294-022-00195-2>
- Castro, G. A., & Camarillo, D. B. R. (2014). Determinants of Tax Revenue in OECD Countries Over the Period 2001-2011. *Contaduría y Administración*, 59(3), 35–59.
- Christianingsih, L., Husaini, A., & Mayowan, Y. (2016). Analisis Pemungutan Pajak Hotel atas Vila di Paguyuban Supo Songgoriti. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 9(1), 1–10.
- Cobham, A., & Janský, P. (2018). Global Distribution of Revenue Loss From Corporate Tax Avoidance: Re-estimation and Country Results. *Journal of International Development*, 30(2), 206–232. <https://doi.org/10.1002/jid.3348>
- Crivelli, E., De Mooij, R., & Keen, M. (2015). *Base Erosion, Profit Shifting and Developing Countries Prepared by*.
- Diouf, M., & Hai, Y. L. (2017). The Impact of Asian Foreign Direct Investment, Trade on Africa's Economic Growth. *International Journal of Innovation and Economic Development*, 3(1), 72–85. <https://doi.org/10.18775/ijied.1849-7551-7020.2015.31.2004>
- Direktorat Jenderal Anggaran. (2021). *Peran Pajak Sebagai Stimulus Ekonomi di Masa Pandemi*. <https://anggaran.kemenkeu.go.id/api/Medias/1693aa3f-38e3-4dff-80d0-247e5e273cd9>
- Egwakhe, J. A., Akinlabi, H. B., & Odunsi, K. (2018). Trade Openness and Tax Revenue Performance in Nigeria (1987-2016). *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(12). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i12/5188>
- Epaphra, M., & Massawe, J. (2017). Corruption, governance and tax revenues in Africa. *Business and Economic Horizons*, 13(4), 439–467. <https://doi.org/10.15208/beh.2017.31>
- Fitriani, S. A., Hakim, D. B., & Widyastutik. (2021). Analisis Kointegrasi Keterbukaan Perdagangan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 12(2), 103–116. <https://doi.org/10.22212/jekp.v12i1.2033>
- Gaalya, M. S. (2015). Trade Liberalization and Tax Revenue Performance in Uganda. *Modern Economy*, 06(02), 228–244. <https://doi.org/10.4236/me.2015.62021>
- Gaspareniene, L., Kliestik, T., Sivickiene, R., Remeikiene, R., & Endrijaitis, M. (2022a). Impact of Foreign Direct Investment on Tax Revenue: The Case of the European Union. *Journal of Competitiveness*, 14(1), 43–60. <https://doi.org/10.7441/joc.2022.01.03>
- Gaspareniene, L., Kliestik, T., Sivickiene, R., Remeikiene, R., & Endrijaitis, M. (2022b). Impact of Foreign Direct Investment on Tax Revenue: The Case of the European Union. *Journal of Competitiveness*, 14(1), 43–60. <https://doi.org/10.7441/joc.2022.01.03>
- Ghozali, I. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Balai Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gnangnon, S. K. (2017). Impact of Foreign Direct Investment (FDI) Inflows on Non-Resource Tax and Corporate Tax Revenue. In *Economics Bulletin* (Vol. 37, Issue 4).
- Ha, L. (2021, December 21). *Emerging Asia to Lead Global Economic and Consumption Growth*. Euromonitor International. <https://www.euromonitor.com/article/emerging-asia-to-lead-global-economic-and-consumption-growth>
- Hamdan, S., & Rana, F. (2021). Determinants of Tax Revenue in Emerging Countries. *Journal of Archaeology of Egypt*, 18(13), 98–106.



- Heller, P. S. (1975). A Model of Public Fiscal Behavior in Developing Countries: Aid, Investment, and Taxation. *American Economic Review*, 429–446.
- Hutagaol, J. (2007). *Perpajakan Isu-Isu Kontemporer*. Graha Ilmu.
- International Monetary Fund. (2023). *Asia and Pacific Regional Economic Outlook: Recovery Unabated amid Uncertainty*. www.IMFbookstore.org
- Janský, P., & Palanský, M. (2018). *Estimating the Scale of Profit Shifting and Tax Revenue Losses Related to Foreign Direct Investment* (WIDER Working Paper, Vol. 2018). UNU-WIDER. <https://doi.org/10.35188/UNU-WIDER/2018/463-6>
- Kim, J., & Osei, M. J. (2020). Foreign Direct Investment and Economic Growth: Is More Financial Development Better? *Economic Modelling*, 93, 154–161. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.econmod.2020.07.009>
- Kitessa, D. T., & Jewaria, T. (2018). Determinants of Tax Revenue in East African Countries: An Application of Multivariate Panel Data Cointegration Analysis. *Journal of Economics and International Finance*, 10(11), 134–155. <https://doi.org/10.5897/jeif2018.0924>
- Maibetly, F., & Idris, I. (2022). Analysis of Factors Affecting Foreign Direct Investment (FDI) in ASEAN (Lower Middle Income) Plus Three: Market Seeking, Resource Seeking or Efficiency Seeking? *Advances in Economics, Business and Management Research*, 659, 441–450.
- Mallick, H. (2021). Do Governance Quality and ICT Infrastructure Influence the Tax Revenue Mobilisation? An Empirical Analysis for India. *Economic Change and Restructuring*, 54(2), 371–415. <https://doi.org/10.1007/s10644-020-09282-9>
- Maryantika, D. D., & Wijaya, S. (2022). Determinants of Tax Revenue in Indonesia with Economic Growth as a Mediation Variable. *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2), 450. <https://doi.org/10.29210/020221522>
- Minh Ha, N., Tan Minh, P., & Binh, Q. M. Q. (2022). The Determinants of Tax Revenue: A Study of Southeast Asia. *Cogent Economics and Finance*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2026660>
- Muibi, S. O., & Sinbo, O. O. (2013). Macroeconomic Determinants of Tax Revenue in Nigeria (1970-2011). *World Applied Sciences Journal*, 28(1), 27–35. <https://doi.org/10.5829/idosi.wasj.2013.28.01.1189>
- Naape, B. (2021). The Interplay Between Economic Freedom and Tax Revenue Performance: Panel Evidence from SADC. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 24(2), 195. <https://doi.org/10.14414/jebav.v24i2.2757>
- Nguyen, T., Nguyen, H., Nguyen, M. H., Goenka, A., & Thanh, H. (2014). *How Does FDI Affect Corporate Tax Revenue of The Host Country?* www.univ-evry.fr/EPEE
- Nurdin, I., & Sugiman, S. (2018). Penerapan Kombinasi Metode Ridge Regression (RR) dan Metode Generalized Least Square (GLS) untuk Mengatasi Masalah Multikolinearitas dan Autokorelasi Info Artikel. *Jurnal MIPA*, 41(1), 58–68. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/JM>
- OECD. (n.d.). *Tax Revenue Definition*. OECD. Retrieved April 10, 2023, from <https://data.oecd.org/tax/tax-revenue.htm#:~:text=Tax%20revenue%20is%20defined%20as,of%20property%2C%20and%20other%20taxes.>
- OECD. (2008). *OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment Fourth Edition 2008*. <https://www.oecd.org/daf/inv/investmentstatisticsandanalysis/40193734.pdf>



- OECD. (2011). Trade openness. In *OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2011*. OECD Publishing. https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/sti_scoreboard-2011-60-en.pdf?expires=1681211072&id=id&accname=guest&checksum=BB7AD4D81EAEF5AE82C651F51B2BFC6B
- OECD, & IMF. (2017). *Tax Certainty IMF/OECD Report for the G20 Finance Ministers*. <https://www.oecd.org/tax/tax-policy/tax-certainty-report-oecd-imf-report-g20-finance-ministers-march-2017.pdf>
- Osei, D. B., Sare, Y. A., & Ibrahim, M. (2019). On The Determinants of Trade Openness in Low- and Lower-Middle-Income Countries in Africa: How Important is Economic Growth? *Future Business Journal*, 5(2), 1–10. <https://doi.org/10.1186/s43093-019-0002-8>
- Permana, S. H., & Rivani, E. (2013). Pengaruh Produk Domestik Bruto, Inflasi, Infrastruktur, dan Risiko Politik Terhadap Investasi Langsung Asing di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 4(1), 75–87. www.weforum.org/
- Pratama, R. A., & Widyastuti, S. (2022). Pengaruh Penerimaan Pajak dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Veteran Economics, Management & Accounting*, 1(1), 104–120.
- Pratomo, A. W. (2019a). The Effect of Foreign Direct Investment on Tax Revenue in Developing Countries. *Jurnal BPPK*, 13(1), 83–95.
- Pratomo, A. W. (2019b). *The Effect of Foreign Direct Investment on Tax Revenue in Developing Countries*. Universitas Indonesia.
- Puspasari, I. D., & Gazali, M. (2022). Pengaruh Keterbukaan Perdagangan, Penanaman Modal Asing, Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 1990–2021. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 405–418.
- Putriana, R. (2022). Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Rasio Pajak di Negara Berpendapatan Rendah dan Menengah. *Scientax*, 3(2), 189–203.
- Saptono, P. B., & Mahmud, G. (2021). Macroeconomics Determinants of Tax Revenue and Tax Effort in Southeast Asian Countries. *Journal of Developing Economies*, 6(2), 253. <https://doi.org/10.20473/jde.v6i2.29439>
- Septiantoro, A. A., Hasanah, H., Alexandi, M. F., & Nugraheni, S. R. W. (2020). Apakah Kualitas Institusi Berpengaruh pada FDI di ASEAN? *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 20(2), 197–211. <https://doi.org/10.21002/jepi.2020.12>
- Setyowati, M. S., & Inriama, M. (2020a). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Foreign Direct Investment dan Tax Rate Terhadap Penerimaan PPh Badan Negara ASEAN. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(4), 325–342.
- Setyowati, M. S., & Inriama, M. (2020b). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Foreign Direct Investment dan Tax Rate Terhadap Penerimaan PPh Badan Negara ASEAN. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(4), 325–342.
- Shubati, R. F., & Awad Warrad, T. (2018). The Effects of International Trade Openness on Government Revenue: Empirical Evidence from Middle East and North African Region Countries. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 8(1), 153–160. <http://www.econjournals.com>
- Simbachawene, M. S. (2018). Improving Tax Revenue Performance in Tanzania: Does Potential Tax Determinants Matters? *Journal of Finance and Economics*, 6(3), 96–102. <https://doi.org/10.12691/jfe-6-3-3>



- Soro, S. S. (2020). Institutional Quality and Tax Revenue in Cote D'Ivoire: Evidence From ARDL Approach. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 10(6), 40–49. <https://doi.org/10.32479/ijefi.10363>
- Sujarwati, A. I., & Qibthiyah, R. M. (2020). Corporate Income Tax Rate and Foreign Direct Investment: A Cross-Country Empirical Study. *Economics and Finance in Indonesia*, 66(1), 25–46.
- Sukirno, S. (2013). *Mikroekonomi Teori Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sutedi, A. (2013). *Hukum pajak* (Vol. 2). Sinar Grafika.
- Tahir, M., & Azid, T. (2015). The relationship between international trade openness and economic growth in the developing economies some new dimensions. *Journal of Chinese Economic and Foreign Trade Studies*, 8(2), 123–139. <https://doi.org/10.1108/JCEFTS-02-2015-0004>
- The World Bank. (2019a). *The World Bank: Indicators*. The World Bank. <https://data.worldbank.org/indicator>
- The World Bank. (2019b). *Worldwide Governance Indicators*. The World Bank.
- Todaro, M. P. (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (7th ed.). Erlangga.
- Ul-Isalm, W., & Siddique, H. M. A. (2017). Determinants of Low Tax Revenue: A panel Data Analysis. *Bulletin of Business and Economics*, 6(1), 28–34.
- UNCTAD. (2012). *World Investment Report 2012*. https://unctad.org/system/files/official-document/wir2012_embargoed_en.pdf
- UNCTAD. (2020). *World Investment Report 2020*. https://unctad.org/system/files/official-document/wir2020_en.pdf
- Wahyu, D., Pratama, P., & Setyowati, E. (2022). Studi Analisis Faktor Pengaruh Pertumbuhan Foreign Direct Investment di Indonesia Tahun 2010-2020. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(3).
- Wahyudi. (2022). Peran Strategis Pajak Mewujudkan Keadilan Sosial. *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 1(1), 58–69.
- Wahyudi, H., & Ayunindien, Q. (2022). Globalisasi Sosial Berpengaruh Negatif bagi Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN? *Jurnal Studi Ilmu Sosial Dan Politik*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.35912/jasispol.v2i1.1418>
- Wijaya, S., & Dewi, A. K. (2022). Determinants of Foreign Direct Investment and Its Implications on Tax Revenue in Indonesia. *JPPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(3), 719. <https://doi.org/10.29210/020221523>
- Yogo, U. T., & Ngo Njib, M. M. (2018). Political Competition and Tax Revenues in Developing Countries. *Journal of International Development*, 30(2), 302–322. <https://doi.org/10.1002/jid.3349>
- Yunus, R. (2022). *Analisis Utang Pemerintah dan Kebijakan Makro terhadap Defisit Anggaran di Indonesia 1980-2020* [Disertasi]. Universitas Hasanudin.
- Zeren, F., & Ari, A. (2013). Trade Openness and Economic Growth: A Panel Causality Test. In *International Journal of Business and Social Science* (Vol. 4, Issue 9). www.ijbssnet.com